



BAGIAN ANGGARAN 005.05
DIREKTORAT BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER II TAHUN 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01



**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**

**DIREKTORAT BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprop
Telp. 07179111513
Pangkalpinang - Bangka Belitung 33148
e-mail : pangkalpinang@ptun.org**

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di

dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester II tahun 2023 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Pangkalpinang, 31 Desember 2023

Kuasa Pengguna Barang

The image shows a circular official stamp of the State Goods Agency (KPKB) with a handwritten signature in the center. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA' and 'AGANSI PENGENDALIAN BARANG NEGARA'. The signature is written in black ink over the stamp.

Dora Natalia Singarimbun, SE., M.M.
NIP. 19811229 200604 2 015

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	10
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	14
4.2.2. Barang Persediaan	15
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	16
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	16
V. Kendala dan Saran	18
5.1. Kendala	18

5.2. Saran	18
VI. Penutup	19

Lampiran

- A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara
- B. Laporan Barang Intrakomptabel
- C. Laporan Barang Ekstrakomptabel
- D. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
- E. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan
- F. Laporan Aset Tak Berwujud
- G. Laporan Barang Bersejarah
- H. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan
- I. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik
- J. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca
- K. Laporan Hibah
- L. Laporan Penyusutan BMN
- M. RTH DAN SURAT KETERANGAN BMN

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkian pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Penswertipkatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI ASET TETAP tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Sakti Modul Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data pendukung SAKTI ASET TETAP dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SAKTI ASET TETAP tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SAKTI ASET

TETAP , sehingga proses penyamaan data dilakukan secara otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ke tingkat Pengguna Barang, yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester II tahun_2023 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Neraca Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp.1.448.500,00 (*Sejuta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	1.448.500
Tanah	0
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Aset tak Berwujud	0
Akumulasi Penyusutan Software	0
Aset Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0
Total	1.448.500

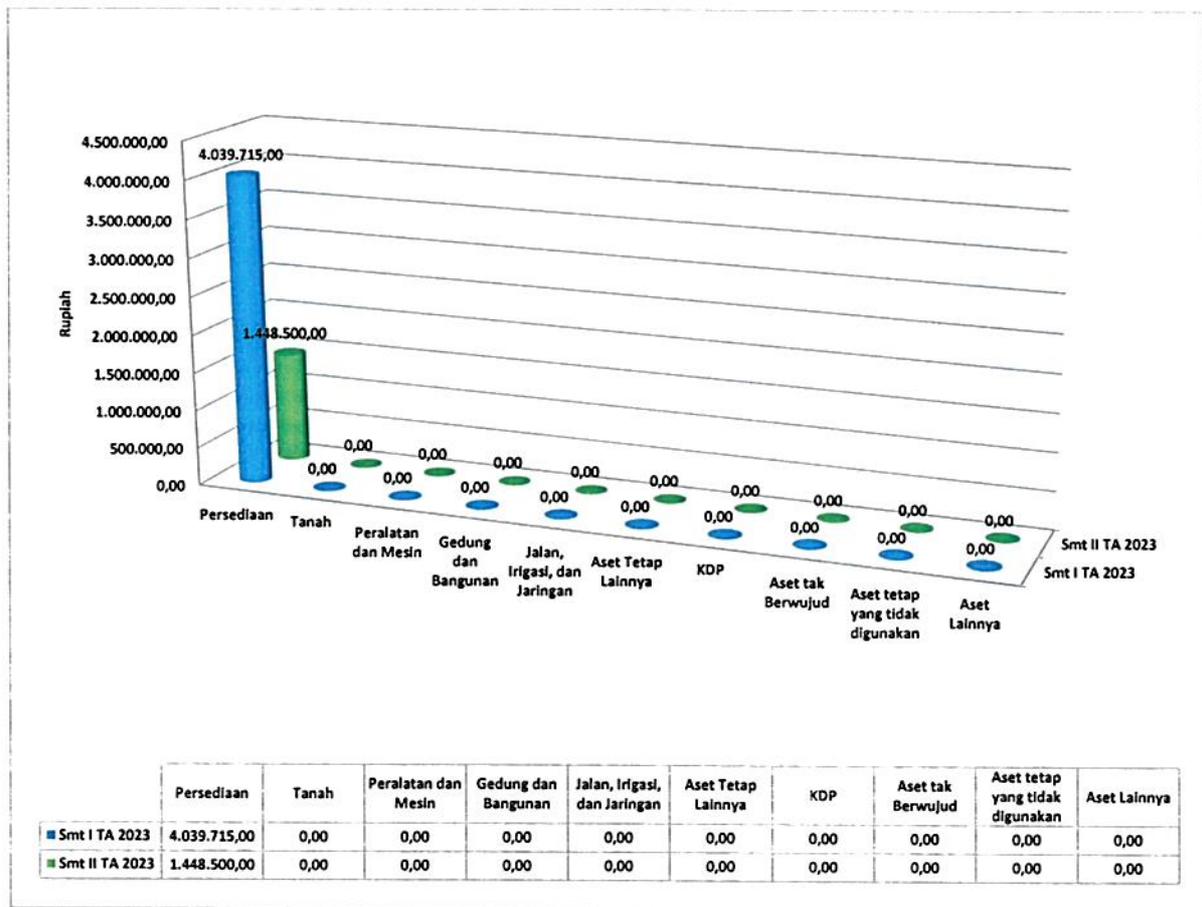
Berikut tabel dan grafik kenaikan/penurunan nilai BMN Semester II 2023 dengan Semester I 2023.

*TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN 2023 DAN SEMESTER II TAHUN 2023
(NILAI INTRAKOMPTABEL)*

<i>NAMA ASET</i>	<i>SEMESTER I TA 2023</i>	<i>SEMESTER II TA 2023</i>
Persediaan	4.039.715	1.448.500
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Akumulasi Penyusutan Software	0	0

Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	4.039.715	1.448.500

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN 2023 DAN SEMESTER II TAHUN 2023
(NILAI INTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

Nilai Aset Tetap pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester II Tahun 2023 tidak mengalami peningkatan;

4.2.2. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester II Tahun 2023 mengalami perubahan nilai sebesar Rp 2.591.215,- yang berasal dari pembelian dan pemakaian barang persediaan.

*TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN 2023 DAN SEMESTER II TAHUN 2023*

<i>PERSEDIAAN</i>	<i>SEMESTER I TA 2023</i>	<i>SEMESTER II TA 2023</i>
Barang Konsumsi	4.039.715	1.448.500,-
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester II Tahun 2023 tidak ada pengerjaan konstruksi sehingga nilai dari konstruksi dalam pengerjaan Rp. 0

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Pada Neraca UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester II Tahun 2023, tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester II Tahun 2023.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

SEMESTER II TAHUN 2023

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Persediaan	1.448.500	1.448.500
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Akumulasi Penyusutan Software	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	1.448.500	1.448.500

4.4 LAIN-LAIN

Pada Semester II TA 2023, tidak terdapat pembelian asset ekstrakomptabel

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

Tidak ada kendala

5.2. SARAN

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester II Tahun 2023 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga dapat mempertahankan predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan reformasi birokrasi sepenuhnya di bidang anggaran, manajemen aset (BMN) dan pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan pengadilan di bawahnya.

LAMPIRAN I
CATATAN RINGKAS
BARANG MILIK NEGARA

LAMPIRAN II
LAPORAN BMN
INTRAKOMPTABEL

LAMPIRAN III
LAPORAN BMN
EKSTRAKOMPTABEL

LAMPIRAN IV
LAPORAN BMN
GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN
EKSTRAKOMPTABEL

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPITABEL DAN EKSTRAKOMPITABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 005

MAHKAMAH AGUNG

UAKPB : 403429

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 26/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 26/02/24 9:27 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_salker

KODE	AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
			KUNANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUNANTITAS	NILAI
					6	7	8	9		
1			4	5					10	11

LAMPIRAN VI

*LAPORAN ASET TAK
BERWUJUD*

LAMPIRAN V
LAPORAN KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 005
UAKPB : 403429

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 26/02/24 6:00 AM
Tanggal : 26/02/24 9:27 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_salker

KODE	AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	JUMLAH S.D 1 JANUARI 2023		MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2023		KETERANGAN
		URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1		2	3	4	5	6	7			

LAMPIRAN VII

*LAPORAN BARANG
BERSEJARAH*

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 26/02/24 6:00 AM
Tanggal : 26/02/24 9:28 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker

KODE	AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			BERTAMBAH	BERKURANG	BERTAMBAH	BERKURANG	
	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7	

LAMPIRAN VIII
BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung
Pangkalpinang - Bangka 33684 Telp / Fax. (0717) 9111513
Email : info@ptun-pangkalpinang.go.id Website : www.ptun-pangkalpinang.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA SATUAN KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG (403429) SEMESTER II TAHUN 2023 NOMOR : 95/SEK.3/W5.TUN5/KU/XII/2023

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-12-2023), bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Muhammad Agus, S.E.,M.Si**
NIP : **198502072006041001**
Jabatan : Petugas UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : **Fanny Ruspanji, S.E.I.**
NIP : **199004122020121009**
Jabatan : Petugas UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (KP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester II Tahun Anggaran 2023		
		Saldo Awal per 31 Desember 2023	Mutasi	Saldo Akhir per 31 Desember 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
A	ASET LANCAR	4.039.715	-2.591.215	1.448.500
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
2	Persediaan	4.039.715	-2.591.215	1.448.500
B.	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
C.	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	4.039.715	-2.591.215	1.448.500
E	EKSTRAKOMPABEL	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	4.039.715	-2.591.215	1.448.500

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKK/L disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operatc Modul Aset Tetap

Muhammad Agus, S.E.,M.Si
NIP. 198502072006041009

Operator SLB

Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP. 199004122020121009

Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Dora Natalia Singarimbun, S.E.,M.M.
NIP. 198112292006042015

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	barang

II. PERIODE	
1 2	/ 2 3

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 0 5	-	0 5	-	3 0 0 0	-	4 0 3 4 2 9	-	0 0 0	-	K D
2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,										

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN						
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL			TOTAL
			Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	ASET LANCAR		0	0	0	0
1	Kas di Bendahara Pengeluaran		0	0	0	0
2	Persediaan		0	0	0	0
B	ASET TETAP		0	0	0	0
1	Tanah		0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin		0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan		0	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0	0	0	0
C	ASET LAINNYA		0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud		0	0	0	0
2	Aset Lain-lain		0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)		0	0	0	0
E	EKSTRAKOMPABEL		0	0	0	0
F	TOTAL (D+E)		0	0	0	0

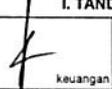
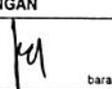
VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode semester II Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,-

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada Pengungkapan lain-lain yang perlu dijelaskan dalam Rekonsiliasi Data BMN ini.

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	barang

II. PERIODE	
1 2	/ 2 3

III. UNIT ORGANISASI	
1. Kode	0 0 5 - 0 5 - 3 0 0 0 - 4 0 3 4 2 9 - 0 0 0 - K D
2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung.

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN						
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL			TOTAL
			Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	ASET LANCAR		0	0	0	0
1	Kas di Bendahara Pengeluaran		0	0	0	0
2	Persediaan		0	0	0	0
B	ASET TETAP		0	0	0	0
1	Tanah		0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin		0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan		0	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0	0	0	0
C	ASET LAINNYA		0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud		0	0	0	0
2	Aset Lain-lain		0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)		0	0	0	0
E	EKSTRAKOMPTABEL		0	0	0	0
F	TOTAL (D+E)		0	0	0	0

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode semester II Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,-

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada Pengungkapan lain-lain yang perlu dijelaskan dalam Rekonsiliasi Data BMN ini.

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
<i>ha</i> barang	<i>h</i> keuangan

II. PERIODE			
1	2	2	3

III. UNIT ORGANISASI																				
1. Kode	0	0	5	0	5	3	0	0	0	4	0	3	4	2	9	0	0	0	K	D
2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang																			
	Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,																			

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN							
No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
NIHIL							

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN							
No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
NIHIL							

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMN						
No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Keterangan
NIHIL						

LAMPIRAN IX

*Laporan Persediaan dan
BA Opname Fisik*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. BangkaBelitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN
(OPNAME FISIK)**

Nomor : 096/SEK.3.W5-TUN5/ KU.02/XII/2023

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
Kode Satker : 403429
UAPPB-W : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
UAPPB-EI : DIREKTORAT JENDRAL BADIMILTUN

Pada hari ini Minggu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini Tim opname fisik :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E.,M.Si. (Kasubbag Umum dan Keuangan)
NIP : 198502072006041001
Jabatan : Ketua.
2. Nama : Rosalina, S.E. (Kasub Bag PTIP)
NIP : 199208082019032017
Jabatan : Sekretaris.
3. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I. (Bendahara).
NIP : 199004122020121009
Jabatan : Anggota.

Menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan (Opname Fisik) Semester II Tahun 2023 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

Demikian Berita Acara Persediaan (Stock Opname) ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik) :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E.,M.Si.

2. Nama : Rosalina, S.E.

3. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I.

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Dora Natalia Singarimbun, S.E.,M.M.
NIP. 198112292006042015



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Kode Satker : 005013000403429000KD.
UAPPB-W : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDRAL BADIMILTUN

No.	Kode Barang	Nama Barang	KUANTITAS BARANG		Selisih *)	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
1	1010307001000002	Toga Hakim	1	1	0	√	-
2	1010307006000001	Tanda Lambang Hakim dan Panitera	2	2	0	√	-

Tim Pelaksana Stock Opname :

1. MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.
2. ROSALINA, S.E.
3. FANNY RUSPANJI, S.E.I.

: 
: 

Pangkalpinang, 31 Desember 2023
Mengetahui,
KUASA PENGGUNA BARANG


Dora Natalia Singarimbun, S.E.,M.M.
NIP. 198112292006042015

UAPB : MAHKAMAH AGUNG

UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA N

UAPPB-W : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DAFTAR TRANSAKSI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KODE UAKPB : 005.05.3000.403429.000.KD

JENIS TRANSAKSI : M13 - Transfer Masuk Online

KODE	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH
117111	Barang Konsumsi		
1010301005	Buku Tulis	37	7,024,400
000002	Buku Agenda Sidang Hakim PTUN	4	798,400
000003	Buku Agenda Sidang Panitera	5	975,000
000007	Buku Register Induk Perkara PTUN	2	394,000
000008	Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus Insidentil	2	394,000
000009	Buku Register Bantu Posbakum PTUN	1	197,000
000010	Buku Register Perkara Permohonan	1	198,000
000011	Buku Bantu Keuangan Perkara (K1-T1)	3	495,000
000012	Buku Jurnal Keuangan Perkara TK 1 (K1 -T2)	1	165,500
000013	Buku Induk Keuangan Perkara (K1 - T3)	1	166,000
000014	Buku Bantu Hak-Hak Kepaniteraan Tingkat Pertama (K1 - T4)	1	194,500
000015	Buku Hak-Hak Kepaniteraan Permohonan Banding (K1 - T5)	2	390,000
000016	Buku Hak-Hak Kepaniteraan Permohonan Kasasi (K1 - T6)	1	194,500
000017	Buku Hak-Hak Kepaniteraan Permohonan PK (K1 - T7)	1	194,500
000018	Buku Keuangan ATK Perkara (K1 - T8)	1	166,000
000019	Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding PTUN (K1 - T3)	1	166,000
000020	Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi PTUN (K1 - T4)	2	332,000
000021	Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali (PK) PTUN (K1 - T5)	2	332,000
000022	Buku Jurnal Keuangan Pengawasan Eksekusi PTUN (K1 - T6)	1	166,000
000030	Buku Himpunan Rumusan Kegiatan Kelompok Kerja dan Bimtek di Lingkungan PTUN & Hasil Rapat Pleno Kamar TUN Periode 2012 s/d 2021	5	1,106,000
1010307001	Bahan Baku Pakaian	1	1,248,500
000002	Toga Hakim	1	1,248,500
	Jumlah	38	8,272,900
117113	Bahan untuk Pemeliharaan		
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	3	2,547,650
000002	Tanda lambang jabatan hakim dan panitera	2	200,000
000005	Kain Laken	1	2,347,650
	Jumlah	3	2,547,650
	Total Jumlah	41	10,820,550

LAMPIRAN X

*LAPORAN POSISI BMN
DAN KEUANGAN PADA
NERACA*

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl.Data : 26/02/24 6:00 AM
Tgl.Cetak : 26/02/24 9:29 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,448,500
J U M L A H		1,448,500

LAMPIRAN XII

LAPORAN PENYUSUTAN

BMN

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 26/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 26/02/24 9:28 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_saike

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2023							
KODE	URAIAN	SAT	KUAN- TITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU	
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI		TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9

LAMPIRAN XI

Laporan Hibah

DAFTAR ASET HASIL PEROLEHAN HIBAH TAHUN 2023

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 ESELON I : 05 DIREKTORAT JENDERAL BADIMILITUN
 WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
 SATKER : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	SATUAN KERJA	NAMA SATKER	BENTUK HIBAH	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BARANG	KET
1	403429	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang				NIHIL	

Pangkalpinang, 31 Desember 2023
 Kuasa Pengguna Barang



Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
 NIP. 198112292006042015

LAMPIRAN XIII
RTH DAN SURAT
KETERANGAN BMN



BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG PERSEDIAAN
Nomor: 1914 /DJMT.L04/PL1.1.1/10/2023

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga, Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : IGN Putra Mahendra
NIP : 196601051986031003
Jabatan : Kabag Umum Set Ditjen Badilmiltun

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

2. Nama : Muhammad Agus, SE.,M.Si
NIP : 198502072006041001
Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan PTUN Pangkal Pinang

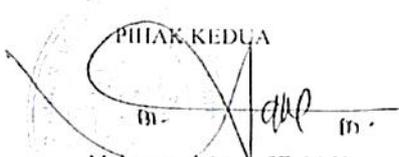
Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Dengan ini pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua Barang Persediaan dengan data sebagai

NO	KODE KELOMPOK BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA BARANG	HARGA TOTAL (Rp)
1	1010301005	Buku Agenda Sidang Hakim PTUN	4	199.600	798.400
2	1010301005	Buku Agenda Sidang Hakim PTTUN	0	213.800	-
3	1010301005	Buku Agenda Sidang Panitera	5	195.000	975.000
4	1010301005	Buku Himpunan rumusan kegiatan pokja dan bintek di lingkungan PTUN dan hasil rapat pleno kamar TUN	5	221.200	1.106.000
JUMLAH			14		2.879.400

Catatan:

- Penerima barang persediaan tersebut diatas agar segera memberikan BAST ini kepada operator Persediaan/asset BMN untuk di input ke dalam aplikasi SAKTI sebagai Transfer Masuk sesuai dengan data yang diberikan.

PIHAK KEDUA

Muhammad Agus, SE.,M.Si

PIHAK PERTAMA

IGN Putra Mahendra, S.H.,M.H.



BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG PERSEDIAAN
Nomor: 2179 /DJMT.1.04/PLI.1.1/11/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : IGN Putra Mahendra
NIP : 196601051986031003
Jabatan : Kabag Umum Set Ditjen Badilmiltun

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

2. Nama : Muhammad Agus, SE.,M.Si
NIP : 198502072006041001
Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan PTUN Pangkal Pinang

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Dengan ini pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua Barang Persediaan dengan data sebagai berikut :

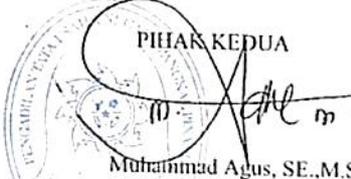
NO	KODE KELOMPOK BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA BARANG (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
1	1010301005	Buku Register Induk Perkara PTUN	2	197.000	394.000
2	1010301005	Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus/Insidentil	2	197.000	394.000
3	1010301005	Buku Register Bantu Posbakum PTUN	1	197.000	197.000
4	1010301005	Buku Register Perkara permohonan	1	198.000	198.000
5	1010301005	Buku Bantu Keuangan Perkara (K1-T1)	3	165.000	495.000
6	1010301005	Buku Jurnal Keuangan Perkara TK 1 (K1-T2)	1	165.500	165.500
7	1010301005	Buku Induk Keuangan Perkara (K1-T3)	1	166.000	166.000
8	1010301005	Buku Bantu Hak-Hak Kepaniteraan Tingkat Pertama (K1-T4)	1	194.500	194.500
9	1010301005	Buku Hak-Hak Kepaniteraan Permohonan Banding (K1-T5)	2	195.000	390.000
10	1010301005	Buku Hak-Hak Kepaniteraan Permohonan Kasasi (K1-T6)	1	194.500	194.500
11	1010301005	Buku Hak-Hak Kepaniteraan Permohonan PK (K1-T7)	1	194.500	194.500
12	1010301005	Buku Keuangan ATK Perkara (K1-T8)	1	166.000	166.000
13	1010301005	Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding PTUN (K1-T3)	1	166.000	166.000
14	1010301005	Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi PTUN (K1-T4)	2	166.000	332.000

15	1010301005	Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali (PK) PTUN (K1-T5)	2	166.000	332.000
16	1010301005	Buku Jurnal Keuangan Pengawasan Eksekusi PTUN (K1-T6)	1	166.000	166.000
JUMLAH			23		4.145.000

Catatan :

- Penerima barang persediaan tersebut diatas agar segera memberikan BAST ini kepada operator Persediaan/asset BMN untuk di input ke dalam aplikasi SAKTI sebagai Transfer Masuk sesuai dengan data yang diberikan.

PIHAK KEDUA



Muhammad Agus, SE., M.Si

PIHAK PERTAMA



IGN Putra Mahendra, S.H., M.H.



BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG PERSEDIAAN
Nomor: 1440 /DJMT.1.04/PLI.1.1/VIII/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jefri Ardianto, ST
NIP : 197704142009041005
Jabatan : Kasubbag Perlengkapan Set Ditjen Badilmiltun

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

2. Nama : Muhammad Agus, SE.,M.Si
NIP : 198502072006041001
Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan PTUN Pangkal Pinang

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

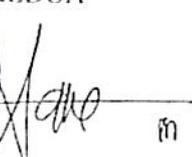
Dengan ini pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua Barang Persediaan dengan data sebagai berikut:

NO	KODE KELOMPOK BARANG	NAMA BARANG	HARGA BARANG (Rp)	JUMLAH	HARGA TOTAL(Rp)
1	1010307001	Toga Hakim	1.248.500	1	1.248.500
2	1010307001	Jas Panitera	1.004.000	0	-
3	1010305999	Laken	2.347.650	1	2.347.650
4	1010305999	Bendera Pengadilan	701.520	0	-
5	1010305999	Bendera Merah Putih	397.380	0	-
6	1010305999	Kalung Jabatan	1.470.750	0	-
7	1010305999	Tanda Jabatan Hakim dan Panitera	100.000	2	200.000
JUMLAH				4	3.796.150

Catatan:

- Penerima barang persediaan tersebut diatas agar segera memberikan BAST ini kepada operator Persediaan/asset BMN untuk di input ke dalam aplikasi SAKTI sebagai Transfer Masuk sesuai dengan data yang diberikan.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Muhammad Agus, SE.,M.Si

MAHKAMAH
PIHAK PERTAMA

Jefri Ardianto, ST

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
 UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA N
 UAPPB-W : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

LAPORAN MONITORING REKLASIFIKASI KELUAR - MASUK
PERIODE DARI TANGGAL 01-01-2023 SAMPAI TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAHA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
 KODE UAKPB : 005.05.3000-403429.000.KD

REKLASIFIKASI KELUAR						REKLASIFIKASI MASUK								
NO DOK	TGL DOK	KODE BARANG	NAMA BARANG	KUANTITAS	HARGA	NILAI	NO DOK	TGL DOK	KODE BARANG	NAMA BARANG	KUANTITAS	HARGA	NILAI	SELISIH
	TGL BUKU							TGL BUKU						
001	31-12-2023	1010305999000002	Tanda lambang jabatan hakim dan panitera	2 Pcs	100.000	200.000	001	31-12-2023	1010307006000001	Tanda Lambang Hakim dan Panitera	2 Pcs	100.000	200.000	
JUMLAH PER NO DOK. 001						200,000							200,000	0



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

SURAT KETERANGAN REKLASIFIKASI BARANG PERSEDIAAN

Nomor : 94b /SEK.PTUN.W5-TUN5/PL1.2.5/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dora Natalia Singarimbun, S.E.,M.M.
NIP : 198112292006042015
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang

Dengan ini menerangkan bahwa terdapat koreksi pencatatan laporan persediaan pada Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (data terlampir) yang dimaksudkan untuk mereklasifikasi barang persediaan. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan pada kode barang sehingga perlu dilakukan reklasifikasi agar sesuai dengan petunjuk dari Pembina Laporan Keuangan Mahkamah Agung pada laporan keuangan semester 2 tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pangkalpinang, 29 Desember 2023

Kuasa Pengguna Barang,



Dora Natalia Singarimbun



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

REKLASIFIKASI KELUAR

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI ASET /Item (Rp)
1	1010305999000002	Tanda Lambang Jabatan Hakim dan Panitera	2 Pcs	200.000

REKLASIFIKASI MASUK

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI ASET /Item (Rp)
1	1010307006000001	Tanda Lambang Hakim dan Panitera	2 Unit	200.000

Pangkalpinang, 29 Desember 2023

Kuasa Pengguna Barang,

Dora Natalia Singarimbun